
PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Nugraeni¹⁾
M. Budiantara²⁾

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

email : nda_eni@yahoo.com¹⁾

krisssnak@gmail.com²⁾

Kata kunci:
standar akuntansi
pemerintah, kualitas
laporan keuangan,
akuntabilitas kinerja

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Penelitian dilakukan terhadap pegawai SKPD pemerintah kota Yogyakarta. Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasilnya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Terbentuk struktur baru dari analisis jalur yang didukung oleh bukti empirik.

Keywords:
government
accounting
standards, financial
reporting quality,
performance
accountability

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of government accounting standards application on the quality of financial statements and its implications on the performance accountability. Application of good accounting by government agencies and the optimal control of the quality of their financial reports are expected to improve the performance accountability of government agencies, so that the performance of the management of government affairs can be optimized. Previous studies that support this hypothesis are Nugraheni and Subaweh (2008), Sumiyati (2008), Christanti (2012), Jannaeni (2012), and many others. Sample of this research is employees of the local unit work of Yogyakarta city government. There are three variables used in this research, they are government accounting standards, financial reporting quality and the performance accountability. Hypothesis testing which is deployed is path analysis. Research results are that the variable of government accounting standards application affects the quality of the financial statements, but does not directly influence the performance accountability. On the other hand the quality of financial statements directly affects the performance accountability. Finally, the new structure which is formed from path analysis is being supported by empirical evidences.

Pendahuluan

Pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumberdaya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Mardiasmo (2004) mengatakan, instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas yang berada dalam tanggungjawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Sesuai dengan amanat undang-undang no 17 tahun 2003 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Deddi dan Hartianti, 2006). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai PP No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 tahun 2010,

terdapat hubungan terkait antara SAP dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Purwaniati dan Imam Subaweh (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan studi pada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dalam penelitiannya Christanti (2012) pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Kusuma (2010) menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh pada

Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dewasa ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Berikut ini perkembangan opini LKPD tahun 2008 – 2012 sebagaimana dalam table 1.

Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD tahun 2008 – 2012

LKPD		OPINI						JUMLAH	
Tahun	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	66%	26	5%	115	22%	516
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	113	27%	267	64%	4	1%	31	8%	415

kualitas laporan keuangan SKPD kota Tasikmalaya.

Penerapan sistem keuangan pada prakteknya tidak terlepas dari persepsi, wawasan dan profesionalisme dari aparatur pemerintahannya itu sendiri. Hal ini berimplikasi terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah. Kualitas dari laporan keuangan tersebut belum mendapatkan opini yang wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Data hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil evaluasi atas SPI yang dilakukan oleh BPK RI menunjukkan kasus-kasus kelemahan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
2. Kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
3. Kelemahan pada struktur pengendalian intern.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama (Santoso, 2008). Jannaini (2012) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002).

Di bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan di bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan memenuhi keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Sumiyati (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Siak. Jannaini (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pada pemerintahan kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas

laporan keuangan dan implikasinya pada akuntabilitas kinerja pada pemerintahan kota Yogyakarta?

Tinjauan Pustaka

Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:

1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah.
2. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
3. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
4. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

5. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
6. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
7. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
8. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
9. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
10. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
11. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
12. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
13. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Kualitas Laporan Keuangan

Agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi akuntabilitas kinerja menurut LAN dan BPKP (2000) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Ledvina (1991) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Mardiasmo, 2003):

1. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sasaran dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Pengembangan Hipotesis

Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai PP No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 tahun 2010, terdapat hubungan terkait antara SAP dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Nordiawan (2006), bahwa adanya pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemenya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan studi pada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dalam penelitian Christanti (2012) pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Kusuma (2010) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan SKPD kota Tasikmalaya, demikian juga penelitian Jannaini (2012). Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Santoso (2008) bahwa secara teoritis penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas maka akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawsan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Jannaini (2012) menyimpulkan bahwa kualitas

laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Maka perumusan hipotesisnya adalah:

H2: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Standar Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Aldiani Sulani Aritonang dan Firman Syarif bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Sumiyati (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Siak. Jannaini (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

Metode Penelitian

Pengumpulan data dan pengambilan sampel

Sampel penelitian ini terdiri dari pegawai bagian akuntansi di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Dari 75 kuesioner yang dikirim, hanya 65 kuesioner yang memenuhi syarat untuk diproses

Definisi Operasional variabel

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dengan indikator: (1) Kerangka konseptual SAP, (2) Konsep penyajian laporan keuangan, (3) Konsep laporan realisasi anggaran, (4) Konsep akuntansi persediaan, (5) Konsep akuntansi aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan, (6) Konsep akuntansi kewajiban, (8) Konsep koreksi kesalahan atas laporan keuangan.

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu dari laporan keuangan sektor publik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Indikatornya adalah: (1) Komitmen, (2) Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten, (3) Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Jujur obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan.

Alat Analisis

Koefisien Jalur

Persamaan jalur sub struktur pertama adalah:

$$Y = P_{YX}X + \epsilon_1$$

Persamaan jalur sub struktur kedua:

$$Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \epsilon_2$$

Keterangan:

X = standar akuntansi pemerintah

Y = kualitas laporan keuangan

Z = akuntabilitas kinerja

PXY = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PXZ = Koefisien jalur Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja

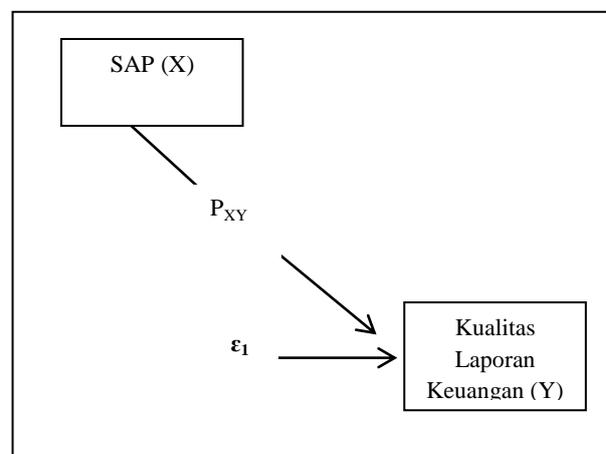
PYZ = Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja

ϵ = Pengaruh faktor lain

Hasil Dan Pembahasan Berdasarkan prosentase total tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada SKPD di pemerintah kota baik. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah cukup baik (Nugraheni dan Subaweh:2008). Kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah kota sangat baik. Dan akuntabilitas kinerja pada SKPD di pemerintah kota adalah baik.

Pengujian Sub Struktur Pertama

Gambar 1
Pengujian Sub Struktur Pertama



Berikut hasil output pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagaimana dalam table 2:

Tabel 2
Hasil Output Pengaruh Standar Akuntansi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,504	4,671		1,607	,113					
	X	,620	,069	,749	8,976	,000	,749	,749	,749	1,000	1,000

Tabel 3
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,749 ^a	,561	,554	4,052	2,241

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah

$$P_{XY} = 0,749$$

$$\varepsilon_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,561^2} = 0,828$$

Persamaannya adalah :

$$Y = P_{XY} + \varepsilon_1$$

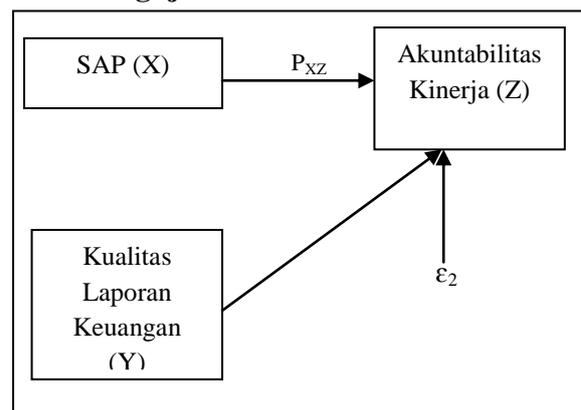
$$Y = 0,749 + 0,828 \varepsilon_1$$

Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa nilai t 8,976 sedang t tabel dengan df = 63 dan tingkat kepercayaan 95% adalah ±1,998 atau t hitung > t tabel, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Pengujian Sub Struktur Kedua

Pada pengujian sub struktur kedua digambarkan sebagai sebagai berikut:

Gambar 2
Pengujian Sub Struktur Kedua



Persamaannya adalah :

$$Z = P_{XZ} X + P_{YZ} Y + \varepsilon_2$$

Adapun output pengaruh standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja yang tersaji dalam tabel 4. Sedangkan nilai signifikansi variabel standar akuntansi pemerintah (X) 0,055 > 0,05, atau standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial atau hipotesis 2 ditolak, maka variabel X dikeluarkan dari sub struktur kedua.

Tabel 4
Output Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,428	2,727		1,257	0,213
	X	0,117	0,060	0,218	1,957	0,055
	Y	0,411	0,072	0,637	5,703	0,000

Tabel 5
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,081	2,419		2,513	0,015
	Y	0,517	0,049	0,800	10,588	0,000

Sumber: Data diolah

Tabel 5 adalah hasil output setelah variabel standar akuntansi pemerintah dikeluarkan dari persamaan sub struktur kedua. Adapun Persamaan sub struktur yang baru adalah:

$$Z = P_{YZ} Y + \varepsilon_2$$

$$P_{YZ} = 0,800$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,640^2} = 0,768$$

Persamaannya adalah :

$$Y = P_{YZ} + \varepsilon_2$$

$$Y = 0,800 + 0,768 \varepsilon_2$$

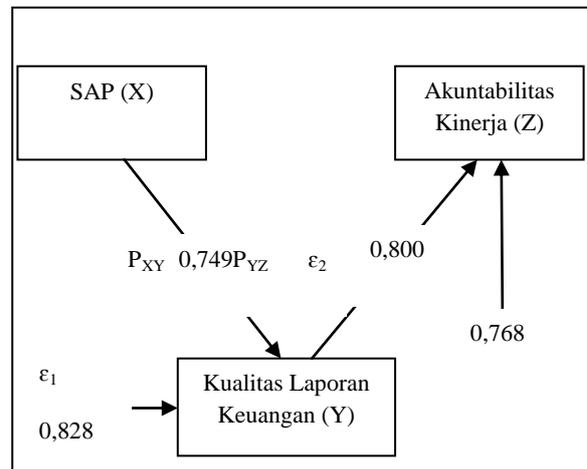
Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat bahwa nilai signifikansi kualitas laporan keuangan (Y) $0,00 < 0,05$ sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja diterima.

Struktur yang baru

Struktur Baru Disajikan Dalam Gambar Sebagai Berikut:

Gambar 3

Diagram jalur masing-masing variabel



Pembahasan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kontribusi standar akuntansi pemerintah (X) yang secara langsung

mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y) = $0,749^2 = 56,1\%$, sedang sebesar 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Yaitu diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana serta transparansi. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dipemerintahan pusat dan daerah. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Kontribusi kualitas laporan keuangan (Y) yang secara langsung mempengaruhi akuntabilitas kinerja (Z) = $0,800^2 = 64\%$, sedang 36% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah dibuat. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga

terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah dan akuntabilitas kinerja pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta baik. Sedang Kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta sangat baik.
2. Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja secara langsung, sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja melalui kualitas laporan keuangan.
3. Terbentuk struktur baru dari hasil penelitian yang didukung oleh bukti empirik.

Keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya

1. Sampel yang digunakan adalah hanya dalam satu pemerintah daerah. Penelitian berikutnya dapat menggunakan beberapa pemerintah daerah dalam satu propinsi, atau

menggunakan pemerintah daerah untuk beberapa propinsi.

2. Data diambil dengan kuisioner. Penelitian berikutnya data masih menggunakan kuisioner tetapi dengan cara wawancara, sehingga lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. S., dan Syarif, F., 2009, "Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu", *Jurnal Akuntansi* 12.
- Bastian, I., 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi, BPFE, Yogyakarta.
- Cristanti, Dianne Natalia 2010, *Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, survey pada biro keuangan setda pemerintahan propinsi Jawa Barat*, skripsi FE Universitas Komputer Indonesia.
- David, Osborne dan Gabler, Ted, 1995, *Reinventing Government*, Terjemahan: Abdul Rosyid, Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Deddi, Nordiana dan Hartianti Ayuningtyas, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ghozali, I, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba empat, Jakarta.
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan <http://pekalongankab.go.id>, Penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang.
- Jannaini, Yuli, 2012. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung)", Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- Kusuma, Arif Ardi, 2010, *Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, studi pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya*, Skripsi jurusan akuntansi FE Universitas Siliwangi.
- LAN dan BPKP, 2000, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaga Akuntansi Negara.
- LAN, 1999, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Ledvina, V.C, 1991, "Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concept", *Asian Review of Public Administration* Vol III.

- Mardiasmo, 2001, *Perencanaan Keuangan Publik sebagai Suatu Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa*, makalah seminar IAI-KASP, Maret, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008, "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1, Vol 13.
- Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis kas menuju akrual.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah basis akrual.
- Permendagri No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan *reviu* atas laporan keuangan daerah.
- Priyatno, Duwi, 2009, *Belajar Olah data dengan SPSS 19*, Andi, Yogyakarta
- Santoso, Urip, 2008, Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah *fraud*, *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP Unpar*, Vol 4, No. 1: hal 14-33.
- Sari, Diana, 2012, Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, *Proceedings*, SNAB, Bandung.
- Solikin, Akhmad, 2006, "Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol 2, No 2.
- Sumiyati, 2012, Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah (SAPD), akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP), SKPD Kabupaten Siak, *universitas Riau*.
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Peemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah